

Universitas Mataram - NTB

Notulensi and Rekomendasi  
(Notes and Recommendations)

Workshop dan Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah  
(Workshop and Socialization of Regional Autonomy)

Project 497-0357 / 104-000  
Strategic Objective 1  
ECG, USAID/Indonesia  
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)  
University of Maryland at College Park

July 6 – 7, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).  
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of  
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

**WORKSHOP DAN SOSIALISASI  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
HOTEL KUSUMA AGROWISATA  
BATU 27 – 28 JULI 2000**

# **NOTULEN AND RECOMENDATION**

**PPKE-FEUB IRIS LPEM-UI USAID**

**WORKSHOP DAN SOSIALISASI  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
HOTEL KUSUMA AGROWISATA  
27-28 JULI 2000**

**Kamis, 27 Juli 2000**

**Session I (pukul 10.00-11.00 wib)**

**Pembicara : DR. Suntoro Isman**

**Instansi : LPEM -FEUI**

**Judul : Realitas Desentralisasi**

**Moderator : DR. Maryunani, SE., MS**

- ♦ Tujuan utama otonomi daerah adalah pelayanan publik di seluruh wilayah negara yang optimal, sekaligus mengungkapkan partisipasi masyarakat daerah dalam penyelenggaraan fungsi bernegara.
- ♦ Pencapaian tujuan otonomi daerah mencerminkan perkembangan peradaban masyarakat madani dan masyarakat sipil yang menuntut:
  1. Keutuhan dan kewajaran pembagian wewenang antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah otonom, dalam beberapa tingkatan otonomi,
  2. Konsistensinya, dengan: (a) kemampuan penyediaan sumber daya manusia dan uang, (b) kemampuan kelembagaan.
- ♦ Selain hal-hal yg telah disebutkan di atas, diperlukan *persyaratan normatif* untuk kelancaran pelaksanaan otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat tiga hal penting:
  1. Kejelasan, mengenai kewenangan (fungsi), di seluruh tingkatan daerah.
  2. Sebagai konsekuensi, konsistensi sumberdaya (uang, SDM baik eksekutif maupun legislatif)
  3. Kelembagaan (institusionalnya).Sehingga jika disimpulkan, otonomi daerah akan berjalan lancar apabila *money follows function*.
- ♦ Permasalahan yang ada mengenai otonomi daerah:
  1. Otonomi daerah dapat diselenggarakan tanpa banyak *excess*.

Otonomi daerah tersebut dilakukan secara bertahap ataupun langsung, yang penting terdapat transfer wewenang dan pembiayaan yang jelas.

2. Penerapan/ kejelasan mengenai pengertian kewenangan pemerintah.
  3. Perlunya perbaikan SDM untuk optimalisasi pelayanan publik.
  4. SDA yang terdapat pada masing-masing daerah pemanfaatannya dipersiapkan secara teknis, melalui teknologi yang tepat guna.
  5. Persiapan *good government*.
- ♦ Realitas yg harus selalu diingat (1) otonomi daerah merupakan gejala yang wajar dan tidak dapat diabaikan, (2) Pada sisi lain, kekuasaan (politis) pemerintah nasional, merupakan kenyataan kehidupan politik.

## **Session II (pukul 11.15-13.15 wib)**

**Pembicara :**

1. DR. Affan Ghaffar (Menteri Administrasi Daerah)
2. DR. Andy Amir Husry (Menteri Otonomi Daerah)
3. Drs. Azhar Mukhlis (Komisi IX Panitia Anggaran DPR-RI)

**Instansi :** DPR dan Menteri Otonomi Daerah

**Topik :** Situasi Saat Ini Dengan Adanya UU dan PP Baru

**Moderator :** DR. Iwan Triuwono, SE, Mec

### **1. Dr. Affan Ghaffar**

**Judul :** Otonomi Daerah, Sebuah Prespektif dan Beberapa Sampel Pengalaman Sehingga Dewasa Ini.

- Otonomi daerah berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat daerah yang selama puluhan tahun telah dimarginalkan, melalui:
  1. *Demokratisasi*, kewenangan yang merupakan kombinasi dari demokrasi dan kemampuan pemerintah pusat untuk manage negara, (dengan perekrutan kepala daerah, menentukan hak wewenang daerah).
  2. *Partisipatif*, (masyarakat daerah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah).

3. *Obyektif*, keputusan ada di tangan rakyat serta meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, supaya bisa mewujudkan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien, serta mandiri.
- Selama ini terjadi kesalahan persepsi terhadap otonomi daerah, yg harus segera dibetulkan, seperti misalnya:
    1. Bahwa otonomi luas selama ini diartikan memberikan peluang kepada daerah untuk berbuat segala sesuatu secara bebas.
    2. Keberadaan otonomi daerah membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya aparat pemerintah daerah.
    3. Pelayanan harus didukung dengan sumber daya yang cukup.
    4. *Kesinambungan*, yang merupakan prinsip otonomi yg seluas-luasnya, tidak dibatasi tempat dan waktu.
  - Lima isu penting:
    1. Bagaimana mewujudkan otonomi daerah yang bertahap, sehingga *revenue* pada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diemban?
    2. Bagaimana dengan penyelesaian masalah personalia dan SDM pada pemerintah daerah dapat dibuktikan ?
    3. Bagaimana dengan potensi SDA setiap propinsi yang berbeda-beda itu dimanfaatkan secara efisien dan efektif, untuk menuju ke arah kemandirian?
    4. Pengawasan akuntabilitas yang tepat.
  - Hakekat dari otonomi daerah antar daerah berbeda-beda, karena potensi dan kebutuhan daerah berbeda-beda, sehingga harus disesuaikan antara kemampuan dan kebutuhan secara efisien dan efektif.
  - Diharapkan otonomi daerah mampu menciptakan kondisi yang kondusif ;
    1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi (dengan merangsang investor untuk berinvestasi, sehingga dapat membantu usaha kecil dan menengah).
    2. Mempermudah perizinan.
    3. *Tax base* yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

4. Memberikan kesempatan pada daerah di segala bidang.

▪ Inti dari UU No. 25

- Membatasi pemerintah pusat
- Sejumlah institusi tidak diperlukan
- Pengawasan secara menyeluruh disegala bidang, tidak hanya masalah *financial* saja.

**2. DR. Amir Husry**

**Judul/ topik: Implementasi Desentralisasi Fiskal**

□ Regulasi pemerintah adalah pada:

1. Pertanggungjawaban Gubernur/ Bupati/ Walikota
2. Kedudukan dan Hak Keuangan Dewan
3. Pedoman Pembentukan, Pemekaran, dan Penghapusan Daerah Otonom
4. Hubungan Kerja Kepala Daerah dengan DPRD
5. Pinjaman Pemerintah Daerah
6. Kekuasaan Otonomi Daerah
7. Manajemen Asset Pusat dan Daerah
8. Organisasi Pemerintah Daerah
9. Realokasi SDM
10. Tata Cara Pengangkatan Kepala Daerah

□ Regulasi Pemerintah, mengenai:

- a) Laporan tahunan kepada pengawas daerah, yang dihubungkan dengan akuntabilitas Gubernur, atau Bupati.
- b) Hak akan fasilitas dan keuangan dari pengawas daerah
- c) Membimbing adanya daerah otonomi yang baru terbentuk.
- d) Hubungan yang fungsional antara pengawas daerah dan Gubernur, serta Bupati

□ Pengimplementasian/ penerapan UU No. 22/ 1999 memerlukan hal-hal berikut:

1. Adanya aturan/ norma untuk mendukung semangat besar daerah untuk otonomi daerah.

2. Penyusunan kelembagaan untuk mewujudkan organisasi yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

3. Penataan personil

Ketiga hal tersebut harus diikuti dengan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah (*money follows function*).

□ Kondisi *miss-interpretation* yang ada dalam otonomi daerah, adalah mengenai kewenangan pusat dan daerah, yang terjadi kabupaten atau kotamadya tidak bisa mengimplikasikan hal tersebut, karena ketidakjelasan wewenang.

□ Aturan implementasi desentralisasi fiskal:

1. Desentralisasi fiskal sebagai sistem komprehensif
2. *Money follows function*
3. Kemampuan pemerintah pusat untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi
4. Diperlukan penanganan yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan
5. Harus memperbesar kewenangan pajak dan penerimaan
6. Setuju dengan aturan-aturan dasar dan menjaga bahwa pemerintah pusat mematuhi
7. Pertahankan sistem yang sederhana dan administrasi yang mudah
8. Sistem transfer sebaiknya konsisten dengan tujuan reformasi desentralisasi
9. Pengintegrasian tiga tingkatan pemerintah (pusat, propinsi, daerah) dalam suatu sistem
10. Menetapkan batasan anggaran yang ketat
11. Membebaskan terjadinya transisi dan evaluasi dari sistem
12. Harus ada pelopor bagi desentralisasi.

3. Drs. Azhar Mukhlis

Judul : Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah

- Inti dari desentralisasi adalah pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas, pengembangan fungsi DPRD, lembaga-lembaga kemasyarakatan secara

optimal. Untuk itu secara normatif desentralisasi menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kotamadya, shg daerah tersebut mempunyai kewenangan dan kekuatan yang lebih besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Kenyataan yang terjadi justru lain, yaitu lebih menekankan kepada pendapatan sektoral yang terpusat, sehingga pemda kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sendiri dan melaksanakan pembangunannya secara maksimal (terlihat dari ketergantungan pemda kepada pemerintah pusat). Begitu juga mengenai tanggung jawab, orientasi pada pemerintah pusat, bukan kepada masyarakat. Akibatnya pelaksanaan di daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimum untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pemecahan masalah bersifat komprehensif, serta tidak menimbulkan efek negatif pada masyarakat daerah itu sendiri. Kebijakan desentralisasi merupakan salah satu pendekatan yg ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan pembangunan yang dihadapi daerah.

Oleh sebab itu DPR bersama pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah melalui UU No 22/ 1999 mengenai pemda dan UU No. 25/ 1999 mengenai perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.

Inti dari desentralisasi atau otonomi daerah adalah penyerahan sebagian besar wewenang pemerintah dari pusat ke daerah yang disertai dengan pengalokasian sejumlah dana untuk mendukung tugas-tugas administrasi dan manajemen pemda dan pembangunan. Yang mana kedua UU tersebut harus dilaksanakan secara terpadu.

APBD pada masa yang akan datang akan banyak mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan dalam sistem perekonomian dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Perubahan yang diharapkan akan terjadi antara lain; (1) format, (2) peranan APBD, (3) mekanisme pengelolaan sejalan dengan semakin meningkatnya kewenangan



daerah serta semakin bertambahnya tugas dan fungsi pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/ kota sebagai titik sentral dari otonomi daerah.

Perubahan format APBD, meliputi empat komponen utama:

1. Penerimaan dan hibah (*revenues and grants*)
2. Pengeluaran atau biaya (*expenditures*)
3. Surplus/ defisit
4. Pembiayaan (*financing*)

Format APBD harus diubah, dengan tujuan untuk (1) memberikan gambaran operasi fiskal pemerintah daerah supaya lebih jelas, baik dari sisi akuntansi keuangan maupun analisa kebijakan fiskal yang efektif, (2) dalam rangka transparansi dan peningkatan akuntabilitas publik, (3) Untuk mewujudkan analisa ekonomi dan analisa komparasi, (4) Penyesuaian dengan format APBN dan mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi fiskal (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999).

## DISKUSI (session I)

Terdapat *excess* dalam otonomi daerah, dimana dari segala sisi terdapat ketidaksesuaian antara teori dan fakta mengenai disintegrasi. Apakah konsep otonomi daerah cocok dengan UU-nya ataukah UU tersebut yang lebih maju dari konsep ?

Apakah konsep otonomi daerah yang terdapat dalam wacana tidak konsekuen (normatif), sedangkan di sisi yang lain, peran serta masyarakat dalam bernegara (masyarakat madani), akhirnya akan melampaui sistem normatif yang ada sehingga bisa menimbulkan kejanggalan, atau dengan kata lain kendalanya justru pada partisipasi masyarakatnya ?

Jawab:

*Excess* dialami ketika bangsa (nasional dan daerah) ingin menerapkan konsep-konsep modern, yang mana pelaksanaannya membutuhkan waktu (misalnya, demokrasi).

*Excess* terjadi karena kita kurang menyesuaikan diri dengan kemampuan.

- A) Apakah kalau ketiga persyaratan tersebut sudah terpenuhi, berarti menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan sebagaimana mestinya?
- B) Bagaimana dengan peranan masyarakat sipil yang kurang disinggung?
- C) Kelima rumusan masalah di atas menggunakan metodologi apa ?
- D) Bagaimana dengan hal-hal di bawah ini
  - Kemampuan *financial* daerah
  - Pendapatan Asli Daerah yang tidak *balance*?
  - Pengelolaan dengan batasan wilayah, dan batasan kewenangan antara DATI I dan DATI II ?

Jawab:

- Konsekuensi keuangan tidak mudah disesuaikan karena *government's expenditures* membutuhkan kontribusi. Fungsi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Perekonomian kita masyarakatnya tradisional, belum mampu membentuk orang dengan kemampuan menghasilkan profit yang tinggi.

- Menutup perimbangan keuangan sudah sering dilaksanakan, tetapi kalau meneliti apakah masalah otonomi daerah adalah masalah yang berat atau tidak agaknya kurang diperhitungkan.

Beberapa permasalahan yang akan datang, mengapa hanya masalah teknis yang diutamakan, bukan masalah perbaikan aparatnya?

Jawab:

Diantara fungsi administrasi atau manajemen, yang relatif ketinggalan adalah urusan kepegawaian, baik masalah uraian jabatan dan balas jasanya. Kelemahan ini terjadi baik pada ORLA dan ORBA. Penanganan masalah tersebut tidak mudah baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mengenai kriteria gaji yang cocok, mungkin yang bisa dijadikan acuan adalah (1) terpenuhinya *primary needs* orang tersebut, (2) tingkat balas jasa, (3) senioritas, (4) untuk jenis pekerjaan dan jabatan yang sama, berapa tingkat gaji yang mampu diberikan oleh sektor swasta, kalau tidak sama, tentunya akan ada ketidakseimbangan antara sektor pemerintah dan swasta.

## ssion II

- 1 Otonomi daerah bertujuan untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia, dan memang "gayung bersambut", untuk itu, sikap pemerintah dalam menghadapi hal semacam ini bagaimana ?
- 2 Apakah dalam revisi UU terdapat pula revisi mengenai pemilihan Gubernur ?
- 3 Mengenai pembebanan cukai rokok di Kediri dan Bondowoso, yang jumlahnya sangat besar diberikan kepada pemerintah pusat, tetapi mengapa daerah tersebut justru tidak mendapatkannya?

Jawab:

- Untuk menentukan mana daerah yang bisa melaksanakan otonomi daerah, banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan jangan tergesa-gesa.  
Otonomi daerah akan dapat terlaksana dengan baik apabila *money follows function*.
- Memotivasi pemilihan Gubernur, Bupati secara langsung, baru kemudian pemilihan Presiden secara langsung. Pemilihan secara langsung tersebut harus mempunyai definisi yang jelas.

Pemerintah mendukung jika ada persyaratan-persyaratan dari bawah, dalam rangka pemilihan aparatur negara.

- Mengenai cukai rokok, berdasarkan UU No 18, Kabupaten Ibukota rencananya akan mendapatkan 20 persen dari *personal income taxes dan firm income taxes*. Masyarakat (konsumen) sebaiknya aktif memantau siapa yang memungut pajak atau cukai yang memberatkan rakyat, supaya bisa ditindak dan tidak dipilih lagi. Seandainya pajak yang dipungut pemerintah justru memberatkan rakyat, maka rakyat bisa menuntut.

Pemungutan cukai rokok sebaiknya bersifat obyektif. Kalau pemerintah daerah hanya semata-mata mencari untung, maka salah. Justru pemerintah daerah harus membuka kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menarik investor.

### Session III (pukul 14.00 – 15.30)

Pembicara : DR. Candra Fajri Ananda, SE, MSc.  
 stansi : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang  
 dul : Perbaikan Perekonomian Melalui Otonomi Daerah  
 oderator : DR. Agus Suman, SE., DEA

Otonomi Daerah yang diberlakukan memiliki perspektif yang berbeda antara pusat dan daerah. Misalnya menurut perspektif pusat perekonomian nasional bisa jadi sudah cukup baik, tetapi menurut perspektif daerah dapat juga sebaliknya. Oleh karena itu perbedaan perspektif ini akan menjadikan dilema kalau tidak diselesaikan.

Otonomi Daerah harus bisa menjamin kedekatan kekuasaan (pemerintah) kepada rakyat.

Otonomi Daerah akan menjadikan respek daerah terhadap pusat semakin besar, bukan sebaliknya.

Otonomi Daerah akan menjamin terjadinya proses pendewasaan politik rakyat dan pemberdayaan masyarakat.

♦ Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengandung beberapa point pokok :

1. Prinsip-prinsip demokrasi, Undang-undang ini menjamin adanya prinsip demokrasi didalam hal peningkatan partisipasi masyarakat.
2. Pemerataan, undang-undang ini menjamin adanya pemerataan pembagian kewenangan antar daerah, sehingga potensi daerah bisa dikembangkan secara lebih optimal.

► Elemen fundamental yang terdapat pada Undang-undang itu :

1. Split model, daerah tidak lagi menjadi alat pusat atau sebagai perpanjangan tangan dari pusat, terutama didalam hal pembuatan kebijakan.
2. Peningkatan peran DPRD, DPRD memiliki peran yang sangat penting didalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Oleh karena itu peningkatan kualitas DPRD sangat mendesak, sehingga prinsip yang menyatakan *strong legislative system* bisa terlaksana.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan tanggung jawab bersama, dalam arti masih dalam koordinasi pusat .
4. Diperlukannya perimbangan pusat dan daerah yang adil dan proporsional berdasarkan kondisi real yang ada di daerah.
5. Pembagian wewenang ke daerah harus memenuhi prinsip *money follows function*.
6. Profesionalisme dan moral yang tinggi merupakan tuntutan didalam peningkatan daya saing antar daerah.

**Pertanyaan-pertanyaan :**

**Nahdiatmoko, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang**

bagaimana caranya untuk menyosialisasikan otonomi daerah, dan orang dapat mengerti arti yang sebenarnya dari otonomi daerah, dan bagaimana konsep pengendaliannya ?

**Idi Darmawan, Pasca Sarjana Universitas Brawijaya**

apa tindakan nyata yang segera dapat dilakukan, sehingga orang segera dapat merasakan keuntungannya ?

**Revi, STIE Malang Kucecwara**

bagaimana caranya memperbaiki kualitas pemerintah, yang kita tahu bahwa pemerintah sulit melakukan perubahan ?

**SM Abdi Nusantara Mandiri**

bagaimana menyelesaikan masalah-masalah anggota DPRD yang masih sektarian ? DPRD menunjukkan *strong legislative system*, tetapi mereka masih memiliki tujuan-tujuan tersembunyi ?

**Jawaban :**

Kebijakan harus transparan kepada masyarakat, misalnya melalui pertemuan rutin dengan pendukung-pendukungnya, sehingga pengertian mereka tentang otonomi daerah, semakin baik. Masyarakat harus tahu proses pembuatan kebijakan sekaligus alasan-alasan dibalik itu.

Dengan melibatkan masyarakat ke dalam konsep otonomi daerah akan membantu pemerintah dan DPRD didalam pengawasan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

Audit keuangan bagi DPRD juga perlu yang dilakukan oleh institusi yang independent.

Training dan kursus untuk anggota DPRD pada topik-topik khusus juga diperlukan untuk memperbaiki kemampuan mereka, misalkan didalam hal : analisis keuangan, manajemen strategi, penganggaran.

Masyarakat harus memiliki motivasi untuk memberikan aspirasinya kepada DPRD.

Kewenangan propinsi untuk mengkoordinasi perbedaan antar daerah.

Kerjasama dengan semua elemen yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kualitas DPRD.

Mekanisme kontrol antara eksekutif - legislatif dan legislatif - masyarakat perlu diperjelas.

**b. Komisi II**

Fasilitator : DR. Munawar Ismail, DEA

Topik : Keuangan daerah

Hasil :

- ▢ Kemandirian daerah, biasanya diukur dengan kemampuan daerah tersebut dalam memberikan sumbangan kepada pemerintah pusat. Proporsi PAD yang semakin tinggi
- ▢ Secara rata-rata, tahun 1996 untuk DATI II, Kabupaten atau Kotamadya, PAD hanya mampu membiayai 13,13 persen belanja daerah. Masing-masing daerah mempunyai kemampuan yang berbeda, ada yang mampu menghasilkan PAD tinggi, dan ada yang rendah.
- ▢ Secara umum kemampuan keuangan daerah perlu ditingkatkan. Yang mana untuk meningkatkan keuangan daerah, seharusnya setiap daerah mempunyai wewenang fiskal yang lebih besar (tentang perpajakan), karena selama ini hasil dari pajak diambil pemerintah pusat.
- ▢ UU No. 18/ 1997, tentang pajak dan retribusi, perlu direvisi, karena hanya dibatasi enam point saja.
- ▢ Dalam usaha meningkatkan PAD, sebaiknya; (1) pajak jangan terlalu tinggi, karena bisa menghambat sektor swasta, (2) jangan sampai menghambat perkembangan ekonomi daerah, yang pada umumnya masih terdapat usaha kecil dan menengah.
- ▢ Dana Alokasi Umum:
  - DAU hendaknya disesuaikan dengan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
  - DAU sebagai wujud pelimpahan wewenang, jangan sampai otonomi daerah menimbulkan ketimpangan yang besar antara daerah yang mampu menghasilkan PAD tinggi dengan daerah yang mampu menghasilkan PAD rendah.
- ▢ Masalah pinjaman dan pengeluaran yang defisit
  - Pengeluaran dikurangi atau pinjaman yang dikurangi
  - Jangan sampai hutang menimbulkan beban daerah dan tidak didasarkan kemampuan daerah tersebut.



c. **Komisi III**

Fasilitator : Drs. Nurkholis, MAcc, Ak

Topik : Akuntabilitas

Hasil :

- Akuntabilitas adalah proses pelaporan informasi keuangan secara transparan kepada publik atau *stakeholder* (LSM, DPRD, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan tersebut).
- Dalam akuntabilitas, pihak eksternal bisa membandingkan antara instansi yang satu dengan instansi yang lain.
- Akuntabilitas, ada kesediaan untuk melakukan tindakan koreksi.
- Upaya-upaya yang harus dilakukan:
  1. Pembenahan organisasi melalui pemberdayaan karyawan, yang melaksanakan proses akuntabilitas, yang merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
  2. Penataan sistem atau aturan main yang jelas, terhadap kinerja akuntabilitas, dengan menggunakan indikator: (a) output, (b) input, (c) outcome, (d) impact.
  3. Pembentukan lembaga pemantau kinerja akuntabilitas.
  4. Perlu direformulasikan rumusan bagian yang mengukur kinerja pemerintah daerah.
  5. Perlu ukuran standar yang jelas.
  6. Perlu optimalisasi peran dalam rangka melayani masyarakat.
  7. Perlu penegak hukum (UU/ PP) untuk menjamin supaya akuntabilitas dapat dilaksanakan.
  8. Penegakan moral (kode etik) terhadap pemberian pelayanan kepada publik.

- Beberapa komentar dari **Bapak Suntoro** terhadap penyelenggaraan Workshop dan Sosialisasi di Batu
- 1. Workshop yang dibiayai oleh pihak luar akan membantu kemampuan daerah didalam meningkatkan kemampuannya dan partisipasi segala unsur masyarakat.
- 2. Partisipasi peserta di dalam sidang pleno maupun di dalam sidang-sidang komisi sangat baik.
- 3. Waktu yang disediakan untuk sidang komisi dan pleno masih membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama menyangkut hal-hal teknis di lapangan.
- 4. Para partisipant menunjukkan tingkat kekritisn yang cukup baik dan mampu memberikan rekomendasi yang cukup baik untuk perbaikan proses otonomi daerah.
- 5. Proses sosialisasi dari suatu hukum / undang-undang memang membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 6. Akuntabilitas perlu di institusikan di dalam masyarakat, DPRD dan pemerintah.

